



**Judul** : Dana Kunjungan DPR Lebih Besar dari Dana AntiKorupsi  
**Tanggal** : Senin, 19 Nopember 2012  
**Surat Kabar** : Koran Tempo  
**Halaman** : A4

# Dana Kunjungan DPR Lebih Besar dari Dana AntiKorupsi

“Lebih baik meminta kedutaan mencari informasi.”

**JAKARTA** — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, anggaran kunjungan luar negeri anggota Dewan Perwakilan Rakyat lebih besar dibanding anggaran pemberantasan korupsi di Indonesia. Adapun angka alokasi anggaran kunjungan ke luar negeri adalah Rp 141 miliar, sedangkan pemberantasan korupsi hanya mendapat jatah Rp 21 miliar pada 2012.

“Alokasi kunjungan kerja tujuh kali lipat lebih banyak dibanding alokasi pemberantasan korupsi,” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, Sabtu lalu.

Banyaknya alokasi anggaran

tersebut, kata Uchok, menandakan ketidakkonsistenan Dewan. Soalnya, anggaran itu naik dibanding pada tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 137 miliar. Padahal para anggota Dewan ini telah berjanji melakukan moratorium kunjungan kerja. “Pada 2012 ini tidak melakukan pemotongan. Malahan, alokasi kunjungan ini terus merangkak naik secara pelan tapi pasti,” ujarnya.

Dari data yang dihimpun Fitra, pada 2012, anggaran untuk Sekretaris Jenderal DPR ke luar negeri sebesar Rp 1,6 miliar, naik dua kali lipat dibanding 2011, yang sebesar Rp 857 juta. Duit sebanyak itu digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka kehumasan, pelestarian arsip negara, dan lain-lain. Sedangkan anggaran untuk Badan Kerja Sama Antarparlemen, pimpinan DPR, Komisi, Badan Legislasi, Badan Urusan Rumah Tangga,

Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Pansus non-RUU, Pansus, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara sebanyak Rp 140 miliar. Naik dibanding 2011, yang sebanyak Rp 137 miliar.

Uchok menyayangkan banyaknya anggaran ini karena hasil dari kunjungan tersebut kerap kali tak nyata. Menurut dia, jalan-jalan ke luar negeri tersebut hanya merupakan bentuk kemewahan menjadi anggota Dewan. “Jadi, sulit bagi anggota Dewan untuk menghapus anggaran kunjungan kerja ini,” ucapnya.

Kunjungan DPR ke luar negeri kembali disorot setelah anggota Badan Legislasi akan berangkat ke Jerman dan Inggris. Kunjungan tersebut untuk mendalami penerapan regulasi yang akan dipakai dalam draft Rancangan Undang-Undang tentang Keinsinyuran. “Pemilihan negara itu masuk-

an dari ahli dan insinyur,” kata Ketua Badan Legislasi DPR, Ignatius Mulyono.

Peneliti Indonesian Budget Center, Roy Salam, menilai momen keberangkatan anggota Badan Legislasi DPR ke Jerman dan Inggris tak tepat. Sebab, sebelumnya, mereka telah berjanji akan melakukan moratorium perjalanan ke luar negeri setelah diprotes masyarakat berkali-kali. “Lewat BURT, DPR kemarin sempat mengatakan akan mematorium perjalanan dinas, artinya sekarang mereka mengingkari pernyataan itu,” katanya.

Roy menyarankan, daripada memboroskan keuangan negara, lebih baik kunjungan tersebut diwakili oleh satu orang saja. Cara lainnya, Dewan dapat meminta bantuan kepada duta besar untuk mencari bahan yang mereka butuhkan. ● NUR | IRA